

# **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REWARD* MASUK PTN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN TINGGI NEGERI DI KABUPATEN KARANGANYAR**

## ***ANALYSIS IMPLEMENTATION THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION ENTRANCE REWARD POLICY IN INCREASING THE PARTICIPATION OF STATE HIGHER EDUCATION IN KARANGANYAR REGENCY***

Oleh: Dina Tri Susilowati, Universitas Negeri Yogyakarta  
[dinatri.2018@student.uny.ac.id](mailto:dinatri.2018@student.uny.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil analisis implementasi menunjukkan bahwa dari segi komunikasi berjalan efektif, dari segi sumber daya kurang efektif karena mengalami hambatan pada sumber daya manusia dan sumber dana, sedangkan sikap cukup positif, dan secara struktur birokrasi juga efektif. Implementasi kebijakan ini berdampak positif terhadap meningkatnya motivasi belajar anak. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yaitu terbatasnya dana, sikap tidak konsisten para pelaksana kebijakan, dan belum adanya pengukuran yang jelas mengenai ketercapaian tujuan kebijakan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, pendidikan tinggi, angka partisipasi pendidikan.

### ***Abstract***

*This study aims to describe the process of implementing the higher education institution Entrance Reward Policy in increasing public higher education participation in Karanganyar Regency. This study used qualitative research methods. The results of the implementation analysis show that communication was effective, in terms of resources it is less effective because of obstacles in human resources and funding sources, while the attitude is quite positive, and the bureaucratic structure is also effective. The implementation of this policy has a positive impact on increasing children's learning motivation. However, there are still some obstacles, namely limited funds, inconsistent attitudes of policy implementers, and the absence of clear measurements of the achievement of policy objectives.*

*Keywords: Policy implementation, higher education, education participation rate.*

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan UU No.20 tahun 2003, pendidikan formal di dalam implementasinya pendidikan terbagi menjadi beberapa jenjang mulai dari pendidikan dasar, pendidikan

jenjang menengah maupun pendidikan tinggi. Menurut Muhardi, M. (2004:479) pendidikan tinggi merupakan indikasi dari kemajuan pendidikan suatu negara di mana pendidikan tinggi diharapkan mampu memberikan sumbangsih manusia yang

berkualitas dalam pengetahuan dan penguasaan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu pemerintah daerah yang aktif meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang pendidikan tinggi (Indah S. W., 2022). Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi dengan memberikan *Reward* bagi siswa yang bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dan diterima di pendidikan tinggi negeri. Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah satu wilayah yang peduli akan pembangunan sumber daya manusia di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menghadirkan kebijakan ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada masyarakatnya untuk menempuh pendidikan tinggi yang diberikan nama Kebijakan *Reward* Masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri).

Kebijakan *Reward* Masuk PTN bukan hanya untuk memberikan motivasi kepada para siswa akan tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi sehingga bisa berdampak positif terhadap Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, (2019) dapat dilihat jika

partisipasi jenjang pendidikan tinggi di Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT). Akan tetapi, fakta ini berkebalikan dengan data dari pusat. Menurut data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) terus mengalami kenaikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Pencapaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) Tahun 2015-2019 Menurut Kemenristekdikti

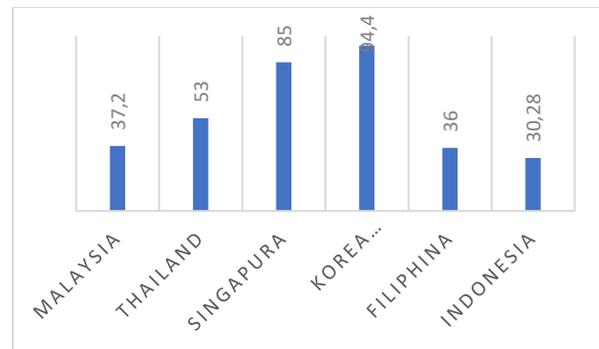
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Pencapaian (%)	25,26	27,98	29,93	30,19	30,28

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Data di atas jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode akhir Rencana Strategis Pendidikan Nasional tahun 2019 yaitu sebesar 32,55% (tiga puluh dua koma lima puluh lima persen) masih berada di bawah target yang ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation Development*) sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam sektor ekonomi pembangunan yang

menetapkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) untuk negara berkembang minimal harus 36% (tiga puluh enam persen) (Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017).

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) masih berada di bawah target Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada jenjang tahun 2015 – 2019 pada setiap tahunnya terdapat selisih 1-1,5% (satu sampai satu koma lima persen). Pada awal Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tahun 2015 target angka yang dapat dicapai sebesar 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada penghujung Renstra Kemenristekdikti pada tahun 2019 mengalami kenaikan hingga mencapai 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen). Hal ini bukan berarti kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan tinggi membuat pemerintah cepat berpuas diri sehingga lupa melanjutkan *trend* angka kenaikan lebih signifikan lagi.



Gambar 1. Perbandingan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi (APK PT) Indonesia dengan negara-negara lain pada tahun 2019.

Sumber: Laporan Kerja Kemenristekdikti, 2020.

Dalam gambar di atas jelas terlihat bahwa posisi Indonesia berada paling bawah dalam pencapaian APK PT jika dibandingkan negara lain. Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi Indonesia masih berada di bawah angka 40% (empat puluh persen). Menurut Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 2020, APK PT di Indonesia sangat jauh tertinggal hampir lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi pendidikan tinggi Singapura.

Menurut paparan ketiga data pencapaian APK PT di atas, pencapaian APK PT belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Daerah Karanganyar telah membuat Kebijakan *Reward* Masuk PTN yang di mana substansi kebijakan terfokus terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi negeri.

Berlandaskan paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN Dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Tinggi Negeri di Kabupaten Karanganyar” dikarenakan penelitian ini belum pernah dilakukan. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya terkait peningkatan akses pendidikan tinggi serta kebijakan pendanaan pemerintah di bidang pendidikan tinggi.

Adapun hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa Berprestasi Diterima Seleksi Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Karanganyar. Asti Wara Ananjani (2011). Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya dengan menggunakan penelitian Dunn sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan analisis implementasi menurut Edward III. Perbedaan selanjutnya adalah di mana penelitian sebelumnya hanya terfokus pada implementasi kebijakan semata akan tetapi untuk penelitian ini akan dikaitkan bagaimana implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi negeri.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan kepada para stakeholder mengenai apa saja yang perlu diperbaiki dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan Dusun Ploso, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan penelitian ini dimulai bulan Oktober 2021 s.d Januari 2022.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala bidang PAUD dan DIKMAS dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karanganyar, orang tua kelas XII, dan siswa kelas XII.

### **Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara sedangkan untuk data sekunder dengan menggunakan data observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan instrument pedoman observasi,

pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung kemudian melakukan wawancara yang dilakukan mendalam dan semi-terstruktur terakhir ialah melakukan dokumentasi terhadap notulensi wawancara, foto pelaksanaan wawancara, dan transkrip hasil wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dicetuskan oleh Miles dan Huberman (2014: 10) yaitu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian kondensasi data dengan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, dan penyajian data yang di dalamnya melakukan analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Artikel ini mendeskripsikan tentang implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar. Di samping itu juga akan dibahas tentang

analisis implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, dan juga akan dibahas tentang manfaat dan permasalahan Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

## **Analisis implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN oleh George C Edward III.**

### **1. Faktor Komunikasi**

Analisis dimulai dari faktor komunikasi, implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar telah berjalan secara efektif. Proses komunikasi pertama adalah antar pelaksana kebijakan yakni aparat pemerintahan kabupaten, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui Kepala Dinas serta Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini ditemukan alur komunikasi antara beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN ini adalah sebagai berikut



Gambar 1. Alur Komunikasi Implementor Kebijakan

Komunikasi kedua terjadi antara aparat pemerintah Kabupaten (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar) dengan Sekolah, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar serta Kepala Desa di wilayah Kabupaten Karanganyar. Proses komunikasi berpotensi mengalami kegagalan antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat karena komunikasi yang bersifat satu arah, di mana aparat pelaksana kebijakan menyampaikan dan menerapkan kebijakan yang dibuatnya tanpa diiringi munculnya *feedback* dari masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

*Feedback* menunjukkan bagaimana persepsi dan penyikapan masyarakat terhadap perlakuan yang dia terima. Dengan demikian letak pentingnya menerima *feedback* dari masyarakat sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan kebijakan

yang dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan konsep komunikasi bahwa, komunikasi bisa dikatakan efektif manakala pesan yang disampaikan komunikator bukan saja bisa diterima pembaca dengan jelas, melainkan juga dapat mempengaruhi dan dilaksanakan oleh komunikan.

Dari sisi *transmission* 'penyampaian', pesan mengenai kebijakan disampaikan kepada dua pihak. Pihak pertama adalah aparat pelaksana kebijakan, dan pihak kedua adalah masyarakat yang akan dikenai kebijakan dalam hal ini siswa yang sedang menempuh pendidikan SMK/SMA maupun siswa lulusan SMK/SMA dan orang tua. Pesan kepada masyarakat dalam hal ini kepada para anak yang sedang menempuh pendidikan SMK/SMA maupun lulusan SMK/SMA dan orang tua yang menjadi objek penelitian pada dasarnya sudah disampaikan dengan jelas, pola penyampaian pesan yang dilakukan pemerintah adalah melalui sosialisasi dengan bantuan berbagai media seperti *web*, meminta bantuan kepada kepala desa untuk menginformasikan pada masyarakatnya dan sekolah melalui surat edaran dan selebaran informasi yang disampaikan melalui *group whatsapp* dan papan informasi seperti dikemukakan oleh narasumber AM sebagai berikut:

Untuk sosialisasi sendiri kita bekerja sama dinas informasi dan komunikasi, Diskominfo Kabupaten Karanganyar selain itu juga ada di web disdikbud karanganyar.kemudian kita meminta bantuan kepada kepala desa di setiap desa untuk memberikan informasi ke masyarakat terus ke sekolah-sekolah seperti itu mbak.

Dari proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang menjadi masalah dan keresahan masyarakat adalah penyampaian informasi pemerintah melalui media *web* di laman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Masyarakat menganggap informasi susah diakses terutama dari kalangan orang tua yang kurang memiliki pengetahuan teknologi dan informasi.

Terdapat kendala yang dihadapi para orang tua untuk mendapatkan informasi secara mandiri akan kebijakan ini. Mereka justru menerima informasi dari orang tua. Jika dilihat maka jelas nampak adanya keterbatasan orang tua memperoleh informasi kebijakan ini dari pihak terkait maka peran anak menjadi sangat krusial dalam keikutsertaan pada kebijakan ini. Anak pun dituntut untuk aktif mencari informasi.

Orang tua dan anak sebagai kelompok sasaran mendapatkan informasi kebijakan ini

dari lingkungan sekolah dengan bertukar informasi dengan teman sebaya

Edward III (1980) mengatakan; *Lack of clarity in policy may not only inhibit intended change, it also may lead to substansial unanticipated change.* Tidak jelasnya pesan yang disampaikan bukan hanya mengakibatkan tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, bisa juga mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki. Sementara untuk penyampaian pesan dari pembuat kebijakan dalam hal ini Bupati Kabupaten Karanganyar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah pelaksana kebijakan telah mendapat pesan secara jelas dari pembuat kebijakan. Kejelasan ini diperoleh melalui penjelasan berulang-ulang dalam koordinasi dan penyampaian kebijakan secara tertulis. Pelaksana kebijakan juga bisa mengajukan pertanyaan kepada pembuat kebijakan jika terdapat kekurangjelasan pesan.

Pesan yang disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini sasaran kebijakan dan orang tua, dari sisi *clarity* 'kejelasan' sudah sangat cukup. Tetapi klaim jelas disini tidak bisa dimaknai bahwa pesan sudah disampaikan kepada semua masyarakat atau warga sekolah, dan tidak pula dimaknai bahwa pesan telah dipahami seluruh lapisan

masyarakat. Perbedaan kondisi sasaran kebijakan membawa akibat klaim "*clarity*" tidak bisa dipergunakan secara umum. Kejelasan pesan yang dimaksud terbatas pada pihak-pihak objek penelitian yang mampu mengakses informasi secara baik dengan langsung maupun tidak langsung dan yang mau aktif dalam menyebarkan informasi tersebut.

Sementara dari sisi *consistance* "konsisten", pesan Kebijakan *Reward* Masuk PTN telah pula disampaikan secara konsisten baik pesan kepada pelaksana kebijakan maupun kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya kepada individu ataupun kelompok masyarakat dan sekolah diberikan pesan yang sama tanpa perubahan apapun. Pengetahuan yang diterima antara pihak kepala desa dan sekolah terhadap kebijakan (pesan) aparat Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa komunikasi saling bertukar pesan telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan diwawancara dari 2 orang narasumber (orang tua dan penerima dana Kebijakan *Reward* Masuk PTN), bahwa dari segi komunikasi mengalami hambatan dengan masih sedikitnya media yang ada untuk memperoleh informasi terutama untuk para

orang tua dari hasil wawancara dengan orang didapatkan informasi jika orang tua hanya mendapatkan informasi sebatas dari anaknya saja untuk informasi dari pihak lain seperti pihak yang digandeng oleh pelaksana kebijakan seperti kepala desa tidak didapatkan padahal pihak ini diharapkan bisa memberikan pesan informasi kebijakan kepada masyarakat terkhususnya orang tua. Sedangkan bagi penerima dana informasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN melalui komunikasi antar teman sebaya dilingkungan sekolah yang menandakan adanya proses komunikasi di pihak yang digandeng pelaksana kebijakan yaitu sekolah. Kemudian untuk hasil wawancara dengan 1 narasumber pelaksana kebijakan merasa komunikasi yang dilakukan cukup baik dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak dan melalui *web* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Dapat disimpulkan pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN dari segi komunikasi efektif walaupun ditemukan beberapa kekurangan di dalam implementasinya akan tetapi secara garis besar jika dilihat dari beberapa sisi seperti dari sisi *transmission* "penyampaian" jelas. Dari sisi *clarity* "kejelasan" sudah sangat cukup. Dari sisi *consistance* "konsisten", pesan Kebijakan *Reward* Masuk PTN telah pula disampaikan secara konsisten

dalam artian proses komunikasi dan pesan dari kebijakan ini diketahui oleh objek penelitian sehingga dapat dikatakan efektif.

## 2. Faktor Sumber Daya

### a. Staf

Pembahasan tentang staf diarahkan pada pembahasan kualitas dan jumlah pegawai-pegawai yang akan terlibat dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980) mengatakan

*We must evaluate the bureaucracy, not only in term of absolute numbers, but also in term of its capabilities to perform desired tasks.*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa menurut Edward III pembahasan mengenai staf tidak hanya membicarakan besaran saja. Karena keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan (kualitas) staf pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, Edward III menyarankan dua besaran pokok dalam menganalisa sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan publik, yaitu menganalisa *size* dan *skills*.

Pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN di Kabupaten Karanganyar lemah dari sisi sumber daya. Pegawai yang terlibat langsung dalam Kebijakan *Reward* Masuk PTN, yaitu Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kabupaten Karanganyar, hanya berjumlah 4 (empat) orang. Akan tetapi dari jumlah tersebut hanya dua orang yang dianggap sebagai pelaksana, dua diantaranya Kasi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar serta kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang menjabat sebagai manajer Kebijakan *Reward* Masuk PTN jadi dalam hal ini kasi dan kepala dinas tidak dihitung sebagai pelaksana lapangan pada kenyataannya staf yang benar-benar sebagai pelaksana lapangan hanya berjumlah dua orang.

Dengan pertimbangan kekurangan tenaga pelaksana yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang tentu berkaitan dengan masalah kelancara implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan instansi yang terkait. empat orang tentu jumlah yang sangat tidak memadai dalam menangani Kebijakan *Reward* Masuk PTN terhadap semua berkas pengajuan dana di Kabupaten Karanganyar dikarenakan pemegang kendali teknis berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AM diperoleh informasi berikut

Tim untuk proses input sendiri ada 2 orang pegawai yang juga memeriksa berkas apabila ada yang kurang akan dihubungi oleh pihak sini selanjutnya ada saya yang bertanggung jawab dalam proses yang terjadi teruss apalagi yaa.... Pak Kadin juga ikut.

Dari sisi *skills* atau kemampuan pelaksana kebijakan, sub dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar tidak memiliki keluhan yang cukup substansif dikarenakan kemampuan dirasa cukup berkapasitas untuk menyelesaikan tanggung tersebut dikarenakan proses verifikasi yang dilakukan secara manual dan input yang dilakukan pada lembar *microsoft excel* yang cenderung bisa dilakukan semua pegawai pemerintahan.

Kurangnya *size* bisa saja dilakukan proses *recruitment* agar semakin banyak pihak yang membantu untuk melakukan berbagai proses didalamnya pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN namun hal tersebut kembali terbentur masalah dana. Penambahan jumlah petugas membutuhkan dana cukup besar apalagi direkrutnya petugas baru dengan keterlampiran tinggi memiliki konsekuensi pemberian gaji yang tinggi juga. Satu-satunya cara mencapai perbaikan (kuantitas) *size* para pelaksana kebijakan baik di tingkat Kabupaten adalah kondisi saat ini (dengan mengharapkan) bantuan dari para masyarakat luar seperti anak yang magang di

Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk membantu berbagai pekerjaan di Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar. Yang menjadi catatan penting adalah orang menjadi terampil tapi tanpa memiliki pemikiran terbuka untuk melakukan inovasi baru akan memperkecil peluang muncul inovasi baru dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

#### **b. Informasi**

Informasi diberikan berdasarkan peraturan yang ada yaitu peraturan bupati mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Atau Sederajat Yang Diterima Di Pendidikan Tinggi Negeri yang tertuang dalam peraturan bupati Nomor 52 Tahun 202 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Negeri.

Untuk media informasi yang digunakan ditingkat pemerintahan adalah melalui laman *web* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Sementara untuk tingkat sekolah melalui selebaran yang ditempel di papan informasi sekolah dan melalui komunikasi antar teman sebaya. Untuk sosialisasi masyarakat terutama melalui para kepala desa hingga saat ini belum diketahui dengan jelas bagaimana metode yang dilakukan. Menurut narasumber AM menuturkan bahwa :

untuk sosialisasi sendiri kita bekerja sama dinas informasi dan komunikasi, Diskominfo Kabupaten Karanganyar selain itu juga ada di web disdikbud karanganyar. kemudian kita meminta bantuan kepada kepala desa di setiap desa untuk memberikan informasi ke masyarakat terus ke sekolah-sekolah seperti itu mbak.

Salah satu indikator yang menunjukkan ketersediaan informasi adalah dengan dimilikinya laman khusus di *web* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan selebaran informasi secara cetak, *web* tersebut bisa diakses kapan pun dan di mana pun oleh masyarakat selain selebaran informasi cetak didistribusikan ke sekolah dan desa-desa di wilayah Kabupaten Karanganyar. Adanya informasi di *web* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berpengaruh kepada kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi melalui internet. Selebaran informasi cetak diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar setiap tahun telah

didistribusikan ke seluruh Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Karanganyar serta desa-desa di wilayah Kabupaten Karanganyar. Namun pada sub bab ini peneliti hanya menerangkan secara umum saja, karena di sub bab sebelumnya pada pembahasan komunikasi telah meliputi pembahasan mengenai informasi, supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan hal yang sama.

### **c. Kewenangan**

Kebijakan tidak akan bisa diterapkan jika tidak disertai pendelegasian kewenangan kepada pelaksana. Setiap tahap Kebijakan *Reward* Masuk PTN yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 Bab V Pasal 6:

- a. Pada tahap perencanaan, kewenangan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Karanganyar.
- b. Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa pihak yang diberi kewenangan berbeda.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dengan memberikan kewenangan terhadap Kepala Dinas serta Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten

Karanganyar serta Badan Keuangan Daerah. Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yaitu Mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan, Dinas membuat daftar Penerima Penghargaan dilengkapi dengan data rekening bank penerima, Dinas mencairkan dana secara bertahap dengan mekanisme transfer ke rekening penerima penghargaan, Dinas mengajukan pencairan dana ke Badan Keuangan Daerah, Dinas mengajukan permohonan kepada Direktur Bank perihal pemindahbukuan.

Selanjutnya mengenai tugas dan tanggung jawab dari Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar ialah menjadi tim verifikasi yang akan membuat daftar nominatif penerima penghargaan yang dituangkan dalam berita acara tim verifikasi. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada tahap pemantauan kewenangan berada di *Inspektorat* Kabupaten Karanganyar. Pada tahap evaluasi kewenangan berada di Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkhususnya Sub

Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan penjelasan di atas wewenang yang dimiliki oleh berbagai lembaga pelaksana kebijakan dapat kita lihat bahwa adanya kecocokan di antara wewenang dengan tugas yang diberikan kepada pihak yang ikut terlibat. Dalam implementasinya pendelegasian wewenang terhadap Lembaga tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Dalam implementasi nya tidak ditemukan keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kewenangan yang diberikan.

#### **d. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)**

Berdasarkan hasil wawancara ke Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar dan penerima dana Kebijakan *Reward* Masuk PTN informasi bahwa di dalam proses implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN penyediaan sarana prasarana dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta penerima *Reward* masuk PTN. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sendiri dalam proses implementasi hanya membutuhkan sarana dan prasarana seperti laptop dan *printer* yang

digunakan untuk proses input nama penerima dan rekening penerima dan sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui dana APBD Kabupaten Karanganyar. Sedangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penerima adalah buku tabungan untuk penyaluran dana serta ATM yang membantu mempermudah proses penarikan tunai uang Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

Berdasarkan hasil temuan dari segi sumber daya hambatan yang terjadi dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN adalah sumber daya manusia dalam arti pejabat yang terlibat dalam proses verifikasi dan input ditingkat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang terbatas dari segi jumlah pegawai yang terlibat dan dari sumber daya (dana) masih terjadi kendala yaitu : jumlah dana yang terbatas membuat kouta yang penerima setiap sesinya dibatasi sehingga ketika jumlah pengajuan membludak terpaksa dialihkan ke sesi selanjutnya sehingga memperlambat waktu pencairan.

### **3. Faktor Sikap**

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sikap dan persepsi implementator dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diembannya, bisa terjadi ditataran tataran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Edward III menyebut gejala ini dengan julukan “*the dispositions of implementators*” tindakan yang bisa menjadi indikasi terjadinya sikap dan tindakan yang negatif antara lain parokhialisme, keengganan, selektif terhadap aspek kebijakan yang menguntungkan dan melalaikan terhadap aspek kebijakan yang tidak “*congruent*” dengan kepentingan organisasi asalnya. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat juga dipengaruhi sifat pelaksana kebijakan dan sikap pasrah terhadap permasalahan yang terjadi.

Mengacu pada hal di atas tentang sikap para *policy maker* dan implementator di jajaran instansi pemerintahan, berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan sikap positif dan mendukung pemberian *Reward* kepada anak yang diterima di pendidikan tinggi negeri baik dari pemerintahan, masyarakat, dan sasaran program, secara kualitas sumber daya manusia para implementator memiliki kesediaan untuk menerima Kebijakan *Reward* Masuk PTN dan kesiapan mengemban tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam wawancara dengan narasumber UM ditemukan sikap positif dari orang tua yang anaknya berkuliah di pendidikan tinggi

negeri dan mendapatkan dana *Reward* untuk meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan kuliah seperti uang saku. Kemudian pendapat tersebut didukung oleh narasumber AI berikut merupakan kutipan wawancara nya:

...karena kan dari awal tuh ada pandangan buat kuliah gitu ya Jadi mungkin adanya *Reward* itu nggak Nggak ngaruh cuman kayak buat motivasi lebih kita biar kalau diterima Wah dapet ini nih kayak lebih semangat gitu aja sih.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa pemberian *Reward* berdampak positif terhadap motivasi dan semangat belajar anak agar diterima di pendidikan tinggi negeri. Dari paparan tersebut menunjukan ada kebanggaan sendiri ketika menerima dana dari Kebijakan *Reward* Masuk PTN. Hal tersebut juga didukung pendapat narasumber AM, berikut merupakan kutipan wawancara :

“...Lebih baik dilanjutkan kan ini berdampak positif terhadap animo masyarakat dan motivasi masyarakat untuk kuliah.”

Dari paparan tersebut pihak penyelenggara kebijakan menginginkan kebijakan untuk terus dilanjutkan karena dampak positif terhadap animo pengajuan dana *Reward* dan motivasi masyarakat untuk kuliah. Dari paparan ketiga narasumber jelas menunjukan adanya sikap positif dan mendukung pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN baik dari penyelenggara

kebijakan. Sasaran kebijakan, dan masyarakat umum.

Berkaitan dengan kesediaan Kasi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar guna menyelenggarakan Kebijakan *Reward* Masuk PTN, temuan hasil penelitian menunjukkan, secara umum Kasi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan siap menerima dan mampu menjalankan Kebijakan *Reward* Masuk PTN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, berikut merupakan kutipan wawancara yang berkaitan dengan narasumber AM sebagai berikut :

...dari tahun 2020 dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya dipegang PKK. Pemindehan lebih ke tupoksi aja sih mbak kan disini itu paud dan dikmas, dikmas kan pendidikan masyarakat jadi *Reward* ini lebih masuk kalau pendidikan masyarakat sesuai dengan ranah kerja mbak..

Menurut Thoha (1992) berpendapat bahwa penyebab atau hambatan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan ada tiga macam yakni: 1) hambatan internal, hambatan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, atau kultur dan budaya (*socio-cultural constrained*s); 2) hambatan eksternal, birokrasi/pemerintah; 3) tingkat

kesadaran yang masih rendah (pendidikan rendah atau kurang informasi).

Mengacu kepada pendapat di atas, dikaitkan dengan implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN di Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar menunjukkan adanya *trend* positif dari masyarakat terutama lulusan SMA/SMK dalam pengajuan dana *Reward* masuk PTN, hal tersebut menunjukkan semakin naik pula *trend* positif anak yang melanjutkan pendidikan tinggi di pendidikan tinggi negeri. Hal ini disebabkan naiknya motivasi dan semangat anak belajar untuk mendapatkan pendidikan tinggi negeri favorit. Hal ini juga sejalan dengan dukungan orang tua siswa terhadap Kebijakan *Reward* Masuk PTN bahwa diadanya Kebijakan *Reward* Masuk PTN dapat meningkatkan semangat belajar dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak ketika kuliah. Sehingga hal ini berdampak positif terhadap kenaikan animo melanjutkan pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar.

Secara umum sikap orang tua sangat mendukung implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN sesuai dengan ketentuan yang ada, mengenai pemberian *Reward* yang hanya dilakukan satu kali bukan menjadi

masalah yang berarti karena pada dasarnya orang tua sudah siap dengan kosekuensi masalah pendanaan yang akan dihadapi dalam proses perkuliahan. Selain itu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terus berupaya menjelaskan kepada siswa lulusan SMA/SMK untuk lebih termotivasi lagi untuk melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Tinggi Negeri dengan cara menyampaikan informasi mengenai Kebijakan *Reward* Masuk PTN secara berulang dan bertahap melalui berbagai pihak yang terlibat dalam sosialisasi.

Ketiga ialah sikap, seperti yang kita lihat dalam proses implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dari 3 pihak yang terlibat dalam proses implementasi yakni pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan, dan pihak luar menunjukkan adanya sikap dan respons yang positif terhadap implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN. Pihak satu dengan lainnya saling mendukung untuk keberlangsungan kebijakan ini kedepannya.

#### **4. Faktor Struktur Birokrasi**

Menurut Edwads III, salah satu bab penting yang harus diperhatikan dalam membicarakan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan publik ialah *Standard Operating Procedures* ( SOP ) dan *Fragmentation*. Meskipun dua hal tersebut

penting banyak hal lain yang harus diberikan perhatian pula. Secara resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Dan Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar memegang kendali SOP (*Standard Operating Procedures*) implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar No.52 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Atau Sederajat Yang Diterima Di Pendidikan Tinggi Negeri. Dimana pihak yang diberi amanah harus bersinergi dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

Di sisi lain walaupun dengan adanya SOP dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan, SOP juga memiliki manfaat tersendiri. Organisasi yang menggunakan prosedur perencanaan yang fleksibel akan memiliki kendali yang baik terhadap kebijakan-kebijakan yang fleksibel pula. Hal ini sangat memungkinkan bisa terjadi adaptasi yang cepat terhadap tanggung jawab yang baru daripada organisasi yang bertolak belakang dengan ciri di atas. Intensitas kecenderungan pelaksana dalam proses implementasi akan mempengaruhi hasil suatu kebijakan. Apabila hal semacam ini

terjadi maka akan terjadi banyak perdebatan pada proses implementasi yang tersebut bisa membuat para bawahan akan menolak sepenuhnya untuk berperan dalam kebijakan tersebut. Selain itu perilaku yang kurang amanah bisa dimanfaatkan para pelaksana untuk mengelak dari tanggung jawabnya secara diam-diam. Dalam menghadapi situasi seperti ini mentikberatkan agar pihak yang terlibat agar melihat peran pengawasan dan pelaksanaan implementasi untuk mengetahui berbagai macam perbedaan efektivitas implementasi kebijakan.

Terkait dengan konsep *fragmentation* yang dikemukakan oleh Edwards III, dapat dilihat bahwasanya implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN tidak mengalami *fragmentation*. Dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN tidak terjadi pemecahan koordinasi implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dan pemecahan pertanggungjawaban kebijakan. Walaupun pada praktiknya di lapangan menunjukkan banyak pihak yang ikut terlibat dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN, namun puncak koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tetap berada di tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten

Karanganyar. Pihak-pihak selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, yang terlibat dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN melakukan tugasnya atas permintaan Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa *fragmentation* bukan menjadi faktor penghambat dalam Kebijakan *Reward* Masuk PTN di Kabupaten Karanganyar. Hingga saat ini belum pernah terjadi miskordinasi dan pertanggungjawaban berbagai pihak terlibat dikarenakan komunikasi yang tidak berjalan baik, apabila dalam satu faktor terjadi *fragmentation* maka hal tersebut harus diberikan perhatian khusus. Selain menganalisa *fragmentation*, dapat ditemukan karakteristik birokrat pada suatu organisasi pelaksana kebijakan yang perlu diiperhatikan secara seksama. Salah satu karakteristik birokrat tersebut berhubungan dengan perilakunya.

Secara internal *fragmentasi* di dalam struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara kebijakan dapat ditekan, akan tetapi *fragmentasi* dengan *stakeholder*

kebijakan dengan masyarakat terjadi karena kepala desa sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab mensosialisasikan kebijakan yang tidak dilakukan secara berkesinambungan sehingga informasi tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mengenai keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan *monitoring* atau dengan kata lain *fragmentasi* dalam hal pengawasan pada pemerintah daerah melakukan *monitoring* dan evaluasi *fragmentasi* birokrasi secara internal dan eksternal. *Monitoring* dan evaluasi internal dilakukan Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar. *Monitoring* dan evaluasi internal yang dilakukan secara berkesinambungan dilakukan dengan harapan proses implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN kedepannya akan berjalan semakin baik dikarenakan diketahui berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN sehingga dapat ditemukan solusi terbaik dari hambatan dan permasalahan yang terjadi. Sementara itu, *monitoring* dan evaluasi eksternal dilakukan oleh lembaga pengawas yang berkompeten diluar pengelola kebijakan antara lain; Inspektorat Jenderal Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Monitoring*

dan evaluasi eksternal dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan program.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, untuk struktur birokrasi di instansi pemerintah tidak mengalami hambatan sementara itu struktur birokrasi dari pemeritahan daerah dengan masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN mengalami hambatan dalam memperoleh informasi dari *web* dan sosialisasi dari kepala desa tidak dilakukan secara maksimal akan tetapi pihak lain seperti sekolah sudah menjalankan fungsi dengan baik dalam mensosialisasikan kebijakan kepada sasaran kebijakan sehingga pemerolehan informasi sasaran kebijakan cukup. Sehingga dapat disimpulkan impementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dari segi struktur birokrasi efektif.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Diperlukan optimalisasi untuk faktor internal terutama komunikasi, dengan melaksanakan sosialisasi secara konsisten; Faktor sumber daya, dengan menambah pejabat pelaksana yang ada, faktor sikap pelaksana dan struktur birokrasi perlu dibangun kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

### Saran

Penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lagi kemudian hari agar semakin banyak penelitian-penelitian mengenai kebijakan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Thoha, M. (1992). *Perilaku organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Ananjani, A. W. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa Berprestasi Diterima Seleksi Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) Di Kabupaten Karanganyar*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas negeri sebelas maret.
- Muhardi, M. (2004). Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(4), 478-492.
- Indah Septiyaning Wardani. “*Reward Masuk PTN di Karanganyar Berlanjut, Anda Sudah Terdaftar?*”. Diakses tanggal 20 Maret 2022 dari

[https://www.solopos.com/Reward-masuk-ptn-di-karanganyar-berlanjut-anda-sudah-terdaftar-1279254#google\\_vignette](https://www.solopos.com/Reward-masuk-ptn-di-karanganyar-berlanjut-anda-sudah-terdaftar-1279254#google_vignette).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi 2020*. Diakses tanggal 20 September 2021 dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%20Indonesia%202019.pdf>

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020 – 2024*. Diakses tanggal 20 September 2021 dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Renstra-Dikti-2020-2024-rev-3.1.pdf>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024*. Diakses tanggal 20 September 2021 dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/RENSTRA-KEMENDIKBUD-full-version.pdf>

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2017*. Diakses tanggal 20 September 2021 dari <https://www.brin.go.id/wp-content/uploads/2018/08/LAPORAN-KINERJA-KEMENRISTEKDIKTI-2017.pdf>